

Analisis Komunikasi Politik Pemerintah dalam Program Literasi Demokrasi melalui Instagram @literasidemokrasi.id.

Tri Hastomo Akbar^{*1}, Muhammad Ilham Ramadhan Avisenna²

^{1,2} Department of Magister Communication, Paramadina University, Indonesia
Email: tri.akbar@students.paramadina.ac.id, ilham.ramadhan@students.paramadina.ac.id

Abstrak

Penelitian ini menganalisis konstruksi komunikasi politik pemerintah dalam Program Literasi Demokrasi melalui akun Instagram @literasidemokrasi.id yang dikelola Kementerian Komunikasi dan Informatika pada tahun 2024. Studi ini berangkat dari keterbatasan kajian mengenai bagaimana media sosial pemerintah digunakan sebagai instrumen literasi demokrasi di luar konteks kampanye elektoral. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain analisis komunikasi politik yang dipilih secara purposif berdasarkan tema demokrasi, literasi politik, dan partisipasi publik. Analisis dilakukan menggunakan model interaktif Miles dan Huberman, serta diperkuat dengan wawancara semi-terstruktur terhadap satu pengelola program dan dua pakar komunikasi digital yang dianalisis secara tematik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konstruksi komunikasi politik pada akun tersebut dibangun melalui tiga pola utama: framing edukatif yang menempatkan pemerintah sebagai fasilitator literasi demokrasi, penggunaan visual dan narasi ringkas yang disesuaikan dengan karakter Generasi Z, serta ajakan partisipasi digital yang cenderung bersifat simbolik dan satu arah. Meskipun mengusung semangat cyberdemocracy, praktik komunikasi yang ditampilkan lebih dominan informatif dan persuasif dibanding deliberatif. Penelitian ini berkontribusi pada penguatan kajian komunikasi politik digital pemerintah dengan menawarkan analisis integratif antara literasi demokrasi dan pemasaran politik digital dalam konteks ruang publik digital.

Kata kunci: *cyberdemocracy; Instagram; Literasi demokrasi, pemasaran politik digital*

Abstract

This study analyzes the construction of government political communication in the Democracy Literacy Program through the Instagram account @literasidemokrasi.id, which is managed by the Ministry of Communication and Information Technology in 2024. This study departs from the limitations of studies on how government social media is used as an instrument of democracy literacy outside the context of electoral campaigns. The research uses a qualitative approach with content analysis design on 48 feed and reel posts during the period of January–December 2024, which were selected purposively based on the themes of democracy, political literacy, and public participation. The analysis was conducted using Miles and Huberman's interactive model, reinforced by semi-structured interviews with one program manager and two digital communication experts, which were analyzed thematically. The results of the study show that political communication on these accounts is constructed through three main patterns: educational framing that positions the government as a facilitator of democratic literacy, the use of visuals and concise narratives tailored to the characteristics of Generation Z, and calls for digital participation that tend to be symbolic and one-way. Although promoting the spirit of cyberdemocracy, the communication practices displayed are more informative and persuasive than deliberative. This research contributes to strengthening the study of government digital political communication by offering an integrative analysis between democratic literacy and digital political marketing in the context of the digital public sphere.

Keywords: *Democracy literacy, cyberdemocracy, Instagram, digital political marketing.*

1. PENDAHULUAN

Demokrasi Indonesia dalam beberapa tahun terakhir dikategorikan sebagai *flawed democracy* oleh Economist Intelligence Unit (2020–2024). Penurunan kualitas demokrasi ini tidak hanya berkaitan dengan aspek institusional, tetapi juga dengan lemahnya literasi politik warga negara, terutama generasi muda (Akmal, 2024). Minimnya literasi politik menyebabkan generasi muda lebih sering menjadi objek mobilisasi politik dibandingkan subjek deliberatif yang kritis. Situasi ini semakin kompleks di era digital, ketika ruang publik dipenuhi polarisasi, hoaks, ujaran kebencian, serta bias algoritmik yang membentuk echo chamber (Arifuddin, 2025).

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mentransformasi praktik demokrasi ke dalam ruang digital. Konsep *cyberdemocracy* merujuk pada praktik demokrasi yang dimediasi oleh internet, di mana komunikasi politik berlangsung melalui pola interaksi many-to-many yang berpotensi memperluas partisipasi publik (Hasfi, 2019). Dalam kerangka ini, ruang publik digital menjadi arena baru bagi negara dan warga untuk berinteraksi, berdialog, serta membangun opini politik. Namun, optimisme terhadap *cyberdemocracy* perlu dikaji secara kritis, mengingat ruang digital juga rentan terhadap manipulasi informasi, komodifikasi perhatian, dan dominasi aktor tertentu.

Dalam konteks komunikasi politik, media sosial tidak lagi sekadar instrumen kampanye elektoral, tetapi telah berkembang menjadi kanal komunikasi pemerintahan (*government political communication*). Pemerintah menggunakan media sosial untuk membangun legitimasi, menyampaikan kebijakan, serta membentuk opini publik (Hasfi, 2019). Praktik ini dapat dianalisis melalui perspektif pemasaran politik digital, yang memandang pesan politik sebagai produk simbolik yang dirancang, dikemas, dan didistribusikan melalui strategi komunikasi tertentu (Astika dan Ira, 2023). Dengan demikian, media sosial pemerintah tidak hanya berfungsi informatif, tetapi juga strategis dan persuasif. Di sisi lain, Generasi Z sebagai *digital natives* memiliki karakteristik konsumsi informasi yang visual, cepat, dan interaktif. Hal ini menuntut pendekatan komunikasi politik yang adaptif, termasuk pemanfaatan narasi visual, interaktivitas, dan strategi *transmedia storytelling* dalam membangun keterlibatan audiens. Dalam perspektif ruang publik digital, efektivitas komunikasi politik pemerintah tidak hanya diukur dari jangkauan pesan, tetapi juga dari kualitas dialog, partisipasi, serta etika komunikasi yang dibangun (Wuryanta et al., 2026).

Untuk merespons tantangan tersebut, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) pada tahun 2024 meluncurkan program Literasi Demokrasi Indonesia melalui berbagai platform media sosial, termasuk Instagram dengan akun @literasidemokrasi.id. Kanal ini menyajikan konten edukatif mengenai demokrasi yang dikemas secara visual dan interaktif. Kehadiran akun ini menunjukkan upaya pemerintah mengintegrasikan prinsip *cyberdemocracy* dengan strategi pemasaran politik digital dalam ruang publik digital. Meskipun berbagai penelitian telah mengkaji komunikasi pemerintah di media sosial, sebagian besar berfokus pada pengaruh komunikasi dialogis terhadap kepercayaan publik (Hastrida, 2023), peningkatan literasi politik dan digital (Farikiansyah et al., 2024), serta potensi media sosial sebagai sarana edukasi politik (Ilhami et al., 2025). Namun, studi-studi tersebut cenderung menempatkan media sosial sebagai instrumen umum komunikasi pemerintah dan belum secara spesifik menganalisis bagaimana strategi komunikasi politik pemerintah dikonstruksi dalam kerangka *cyberdemocracy* pada platform tertentu seperti Instagram. Selain itu, penelitian sebelumnya lebih banyak menyoroti aspek dampak atau pengaruh, sementara aspek representasi narasi, strategi penyusunan pesan, dan model pemasaran politik digital yang digunakan pemerintah dalam konteks edukasi demokrasi masih terbatas.

Penelitian-penelitian sebelumnya tentang komunikasi pemerintah menitikberatkan pada penggunaan dan pengaruh media sosial atas kepercayaan pada pemerintah dalam upaya meningkatkan literasi politik dan literasi digital. Penelitian Hastrida dan Hendriyani (2023) menunjukkan pengaruh yang signifikan dalam komunikasi dialogis melalui media sosial terhadap kepercayaan pada pemerintah. Studi Farikiansyah et al. (2024) memperlihatkan bahwa literasi politik dan literasi digital, didukung oleh pengajaran kontekstual dan integrasi teknologi, mampu meningkatkan kesadaran politik dan partisipasi aktif pemuda, dan memperluas akses informasi politik yang valid serta melatih kemampuan berpikir kritis. Sementara, penelitian Laventia et al. (2025) menunjukkan bahwa media sosial memiliki potensi besar sebagai alat edukasi politik, terutama dalam meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat,

dengan tetap memperhatikan penyebaran hoaks, ujaran kebencian, bias algoritma, dan fenomena echo chamber yang mampu menghambat pemahaman politik yang objektif. Serta penelitian terdahulu yang berfokus pada penggunaan Instagram sebagai instrumen komunikasi politik pemerintah dari sukma alam (2021) mengatakan bahwa menunjukkan bahwa menggunakan media sosial mampu memberikan dampak pengaruh ke publik dengan mengunggah konten berupa video, foto dan infografis serta caption menarik, sehingga publik akan merespons konten tersebut (feedback). Selain itu, media sosial juga sangat membantu dalam proses komunikasi politik seperti menyerap aspirasi publik, komunikasi dua arah dan pesan yang disampaikan lebih jelas dan efektif (Alam, 2021).

Berdasarkan fenomena yang terjadi sehingga penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana komunikasi politik pemerintahan direpresentasikan melalui akun Instagram @literasidemokrasi.id sebagai bagian dari program Literasi Demokrasi Indonesia tahun 2024. Secara khusus, penelitian ini mengkaji bagaimana Komunikasi Politik Pemerintah dalam Program Literasi Demokrasi melalui Instagram @literasidemokrasi.id.. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dalam pengembangan kajian komunikasi politik digital pemerintah, sekaligus menawarkan model komunikasi politik yang partisipatif dan etis dalam ruang publik digital.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif deskriptif dengan desain studi kasus untuk memperoleh gambaran yang sistematis dan mendalam mengenai komunikasi politik pemerintah dalam program Literasi Demokrasi Indonesia melalui akun Instagram @literasidemokrasi.id yang dikelola oleh Tim Kerja Informasi dan Komunikasi Politik dan Pemerintahan, Direktorat Informasi dan Komunikasi Politik, Hukum, dan Keamanan, Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik, Kementerian Komunikasi dan Informatika. Pendekatan ini dipilih karena penelitian tidak hanya menganalisis konstruksi pesan yang dipublikasikan, tetapi juga menggali secara langsung perspektif para aktor yang terlibat maupun pengamat eksternal terhadap praktik komunikasi politik digital tersebut. Sumber data utama melalui wawancara untuk memahami rasionalitas kebijakan komunikasi, strategi segmentasi audiens, serta evaluasi kritis terhadap implementasi literasi demokrasi di ruang digital. Serta Data pendukung dari studi literatur dan dokumentasi.

Data utama diperoleh melalui wawancara semi-terstruktur dengan tiga informan yang dipilih secara purposive berdasarkan relevansi dan kapasitas keahliannya. Informan pertama merupakan penanggung jawab program Literasi Demokrasi Indonesia yang diwakili oleh Ketua Tim Kerja Informasi dan Komunikasi Politik dan Pemerintahan, dengan fokus pembahasan pada strategi komunikasi, tujuan pembentukan akun, serta segmentasi audiens khususnya Generasi Z. Informan kedua adalah Algooth Putranto sebagai akademisi komunikasi digital yang memberikan perspektif teoretis mengenai cyberdemocracy dan efektivitas komunikasi politik digital. Informan ketiga, Enda Nasution sebagai praktisi media sosial, memberikan pandangan kritis terkait karakteristik audiens digital serta konsistensi konten akun dengan tema literasi politik yang diusung.

Proses analisis data mengikuti model interaktif Miles, Huberman (Miles & Huberman, 1994), yang meliputi tiga tahapan, yaitu kondensasi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan. Pada tahap kondensasi data, peneliti melakukan seleksi, klasifikasi, dan pengkodean awal terhadap konten berdasarkan indikator yang disusun dari kerangka teori *cyberdemocracy*, komunikasi politik pemerintah, dan pemasaran politik digital. Indikator tersebut mencakup: (1) konstruksi narasi (framing isu, penggunaan bahasa, representasi aktor), (2) strategi visual dan penyajian pesan, (3) dimensi partisipasi digital (ajakan interaksi dan respons dialogis), serta (4) aspek etika dan akuntabilitas pesan. Tahap penyajian data dilakukan melalui penyusunan matriks kategorisasi tematik untuk melihat pola dan konsistensi strategi komunikasi. Selanjutnya, penarikan kesimpulan dilakukan melalui pembacaan berulang dan verifikasi silang antar kategori guna memastikan validitas interpretasi.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Akun Instagram @literasidemokrasi.id berada di bawah tanggung jawab dan kelolaan dari Tim Kerja Informasi dan Komunikasi Politik dan Pemerintahan, Direktorat Informasi dan Komunikasi Politik, Hukum, dan Keamanan, Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik, Kementerian

Komunikasi dan Informatika (Kominfo). Dalam hal ini, ketua tim kerja tersebut adalah saudara Agus Tri Yuwono yang karena kewenangan dan kedudukannya tersebut, peneliti menjadikan yang bersangkutan sebagai informan yang kemudian dituliskan sebagai Informan I. Guna mendapatkan pandangan dan menghasilkan analisis yang lebih mendalam dan komprehensif, peneliti juga melakukan wawancara dengan akademisi sekaligus praktisi komunikasi, Algooth Putranto yang kemudian dituliskan sebagai Informan II; juga wawancara dengan social media advocate Enda Nasution yang kemudian dituliskan sebagai Informan III.

Informan I, mengatakan, dalam upaya mendukung Pemilu Damai 2024, Kementerian Kominfo mengimplementasikan tiga strategi komunikasi publik di ruang digital. Ketiganya ialah tingkat hulu, tingkat tengah, dan tingkat hilir. Pada tingkat hulu, kementerian melaksanakan program literasi digital yang mencakup keterampilan digital, etika digital, budaya digital, dan keamanan digital. Kemudian pada tingkat tengah, kementerian melakukan tindakan cepat untuk menghapus konten negatif di platform digital. Selanjutnya di tingkat hilir, kementerian melakukan koordinasi dengan aparat penegak hukum untuk menegakkan hukum terkait penyebaran informasi palsu. Hal tersebut terungkap pada wawancara berikut:

“Ada nih strategi komunikasinya. Kita punya tiga pendekatan ya istilahnya tingkat hulu, tengah, dan hilir. Di hulu, kita fokus di edukasi literasi digital: soal etika, budaya, dan keamanan digital. Di tengah, kita sigap hapus konten negatif. Terus di hilir, kita bareng aparat hukum buat tindak penyebaran hoaks.” (Informan I, Agus Tri Yuwono, Ketua Tim Kerja IKPP)

Pada tingkat hulu, penguatan literasi digital (keterampilan, etika, budaya, dan keamanan digital) berfungsi sebagai langkah preventif agar masyarakat mampu memilah informasi secara kritis. Pendekatan ini sejalan dengan kerangka literasi media dan informasi yang dikembangkan UNESCO (2018), serta didukung temuan (Mujianto & Nurhadi, 2022) yang menunjukkan bahwa intervensi literasi digital dapat menekan kecenderungan penyebaran hoaks. Artinya, edukasi menjadi fondasi penting untuk membangun ketahanan masyarakat terhadap disinformasi politik.

Pada tingkat tengah dan hilir, Kominfo melakukan penghapusan cepat konten negatif serta berkoordinasi dengan aparat penegak hukum untuk menindak penyebaran informasi palsu. Langkah ini mencerminkan kombinasi pendekatan teknis dan yuridis dalam menjaga ruang digital tetap kondusif. Kajian Tucker, Joshua A. dkk. (2018) menegaskan bahwa disinformasi yang tidak ditangani dapat memperdalam polarisasi politik, sehingga respons cepat dan penegakan hukum menjadi krusial (Tucker & Guess, 2018). Dengan demikian, strategi hulu–tengah hilir tersebut memperlihatkan upaya komprehensif negara dalam memperkuat literasi demokrasi dan menjaga integritas proses pemilu di era digital.

Sementara itu, Informan II mengatakan, di tengah meningkatnya dominasi ruang digital sebagai medium komunikasi politik, program ini dipandang sebagai bentuk adaptasi pemerintah terhadap lanskap komunikasi politik yang semakin digital dan terdesentralisasi. Akun tersebut menjadi kanal strategis dalam membangun literasi politik generasi muda, terutama milenial dan Gen Z, yang sudah terbiasa dengan format komunikasi visual dan interaktif. Informan II mengatakan, generasi milenial dan generasi Z tumbuh dalam ekosistem digital yang serba cepat, visual, dan interaktif dan media sosial seperti Instagram menjadi semacam ‘ruang publik’ baru bagi mereka. Oleh karena itu, kehadiran akun ini bukan hanya soal teknis membuka saluran komunikasi, tetapi merupakan usaha negara untuk masuk ke dalam ruang dialog digital secara relevan.

Namun, keberhasilan inisiatif semacam ini tidak bisa hanya diukur dari sisi permukaan seperti jumlah pengikut atau tingkat interaksi. Literasi demokrasi menuntut perubahan cara pandang, peningkatan kesadaran, dan keterlibatan aktif warga negara. Informan II menilai Generasi Z sangat responsif terhadap konten yang autentik, inklusif, dan mengundang mereka untuk terlibat, bukan hanya menerima informasi secara pasif. Oleh karena itu, keberhasilan akun seperti @literasidemokrasi.id sangat bergantung pada gaya komunikasi dan bentuk konten yang disajikan.

Dalam konteks ini, media sosial seperti Instagram telah bertransformasi menjadi “ruang publik” baru bagi generasi milenial dan Generasi Z. Konsep ini sejalan dengan gagasan ruang publik digital yang dikembangkan oleh Habermas, Jürgen, yang menekankan pentingnya ruang dialog dalam pembentukan opini publik (Rizqian, 2025). Di era digital, ruang tersebut tidak lagi terbatas pada forum

fisik, tetapi hadir dalam bentuk platform interaktif yang memungkinkan partisipasi langsung warga. Penelitian (Rahmah et al., 2025) juga menunjukkan bahwa generasi muda cenderung membangun keterlibatan politiknya melalui media sosial yang bersifat visual, cepat, dan partisipatif, sehingga pendekatan komunikasi pemerintah harus menyesuaikan karakteristik tersebut agar tetap relevan.

Keberhasilan literasi demokrasi tidak cukup diukur dari metrik kuantitatif seperti jumlah pengikut atau tingkat interaksi. Literasi demokrasi menuntut perubahan kognitif dan sikap politik yang lebih mendalam, seperti meningkatnya kesadaran kritis dan partisipasi aktif. Penelitian sebelumnya oleh (Buru et al., 2025) menegaskan bahwa partisipasi politik generasi muda akan lebih bermakna ketika mereka dilibatkan secara dialogis, bukan sekadar menjadi penerima informasi. Selain itu, penelitian (Ardiansyah & Muhaimin, 2024) menunjukkan bahwa pendekatan komunikasi yang autentik dan interaktif lebih efektif dalam meningkatkan pemahaman politik di media sosial.

Salah satu pendekatan yang disarankan adalah transmedia storytelling, di mana narasi disampaikan lintas format dan platform, mulai dari reels, *carousel edukatif*, hingga kolaborasi kreatif dengan influencer atau kreator konten yang dipercaya. Dalam kerangka ini, akun pemerintah tidak lagi berfungsi sebagai corong satu arah, melainkan menjadi fasilitator diskusi publik yang relevan dan kontekstual. Hal ini menegaskan pentingnya memahami psikologi digital dari audiens muda untuk memastikan pesan demokrasi tidak hanya terdengar, tapi juga dimaknai.

Di sisi lain, realitas *cyberdemocracy* Indonesia masih diliputi ambiguitas. Informan II menyatakan bahwa saat ini Indonesia berada di fase ambivalen. Di satu sisi, media sosial telah membuka kanal partisipasi warga yang sebelumnya terbatas. Tapi di sisi lain, ruang digital juga menjadi ladang subur bagi disinformasi, polarisasi, dan manipulasi opini. Dengan kata lain, *cyberdemocracy* Indonesia belum sepenuhnya sehat karena kualitas partisipasi belum seimbang dengan intensitasnya.

Pernyataan ini diperkuat oleh kenyataan bahwa banyak warga digital yang aktif secara numerik (terlihat dari komentar, likes, share), namun belum memiliki fondasi literasi kritis yang memadai. Informan II mengatakan bahwa narasi yang emosional dan provokatif lebih cepat viral dibanding informasi yang valid dan rasional. Fenomena ini berpotensi merusak iklim demokrasi karena menciptakan disinformasi massal dan memperkuat bias politik yang tidak berbasis fakta. Dalam konteks tersebut, akun @literasidemokrasi.id tidak cukup hanya berdiri sebagai satu inisiatif terisolasi. Harus ada ekosistem kolaboratif yang mencakup aktor-aktor seperti akademisi, jurnalis, komunitas digital, dan content creator independen. Mereka harus saling melengkapi dalam membentuk ruang dialog yang sehat dan memperkuat kapasitas warga dalam memahami hak dan tanggung jawab mereka sebagai bagian dari sistem demokrasi.

Sebagaimana disampaikan oleh Informan II kepada peneliti, *cyberdemocracy* yang sehat hanya bisa tumbuh jika warganya punya akses terhadap informasi yang jernih, punya ruang dialog yang aman, dan diberi kepercayaan untuk berpartisipasi tanpa rasa takut atau intimidasi. Oleh karena itu, kehadiran akun @literasidemokrasi.id bisa dilihat sebagai langkah awal menuju demokrasi digital yang lebih inklusif, namun tetap membutuhkan intervensi lintas sektor untuk menjadi benar-benar efektif dan berkelanjutan. Hal tersebut terungkap pada wawancara berikut:

“Makanya, saya kira kehadiran akun seperti literasidemokrasi.id penting sebagai penyeimbang. Tapi tidak bisa berhenti di satu akun. Harus ada ekosistem kolaboratif: antara negara, akademisi, kreator konten independen, jurnalis, dan komunitas digital. Karena *cyberdemocracy* yang sehat hanya bisa tumbuh jika warganya punya akses terhadap informasi yang jernih, punya ruang dialog yang aman, dan diberi kepercayaan untuk berpartisipasi tanpa rasa takut atau intimidasi.” (Informan II, Algooth Putranto, Pengamat Media Sosial/Akademisi Ilmu Komunikasi)

Sementara Informan III menyebutkan, perkembangan demokrasi digital di Indonesia mengalami dinamika yang kompleks. Inisiatif-inisiatif baru, termasuk yang bermula dari media sosial seperti akun Instagram @literasidemokrasi.id, mulai bermunculan sebagai respons terhadap kebutuhan literasi politik di era digital. Namun, efektivitas dari inisiatif semacam ini masih menjadi tanda tanya, terutama jika dilihat dari sudut pandang para pemerhati media sosial dan demokrasi digital. Menurut Informan III, akun @literasidemokrasi.id masih belum menunjukkan arah yang jelas dalam mengusung konsep literasi demokrasi. Kontennya dinilai terlalu beragam dan tidak fokus, mencakup isu-isu mulai dari judi online hingga privasi, yang tidak semuanya secara langsung berkaitan dengan gagasan demokrasi. Di

samping itu, kredibilitas akun tersebut juga dipertanyakan karena diduga memiliki banyak pengikut tidak aktif atau akun palsu, yang kemungkinan besar merupakan hasil pembelian. Hal itu terungkap pada wawancara berikut:

“Kalau dilihat kontennya belum jelas ya apa yang dimaksud dengan literasi demokrasi, postingannya bahas dari judul sampai privasi. Follower-nya banyak akun bodong, kemungkinan beli.” (Informan III, Enda Nasution, Social Media Advocate)

Dari sisi konsep, Informan III mengakui bahwa ide mengedukasi masyarakat mengenai demokrasi melalui platform digital adalah langkah yang baik. Namun, ia menekankan bahwa istilah yang tepat dalam konteks ini seharusnya adalah digital democracy, bukan cyberdemocracy, karena istilah digital democracy lebih mencerminkan praktik partisipatif yang konkret di ruang digital. Hal ini terungkap pada wawancara berikut:

“Secara ide bagus-bagus aja untuk meningkatkan literasi tentang demokrasi di platform digital, umumnya disebut digital democracy, bukan cyberdemocracy.” (Informan III, Enda Nasution, Social Media Advocate)

Yang menjadi perhatian utama dari Informan III adalah pendekatan yang digunakan. Ia berpandangan bahwa literasi demokrasi tidak cukup hanya disampaikan melalui informasi satu arah seperti unggahan media sosial. Sebaliknya, ia menilai bahwa pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap demokrasi digital seharusnya dibentuk melalui praktik langsung. Digital democracy, dalam pandangannya, baru bisa benar-benar terbentuk ketika masyarakat terlibat dalam proses pengambilan keputusan publik melalui forum daring, kampanye digital, atau ruang diskusi yang melibatkan interaksi dua arah.

Terkait akun @literasidemokrasi.id, Informan III belum melihat adanya dampak konkret yang ditimbulkan terhadap peningkatan literasi atau partisipasi publik di ranah digital. Hal ini memperkuat argumen bahwa kanal informasi digital tidak akan cukup efektif jika hanya berhenti pada distribusi informasi tanpa mendorong keterlibatan aktif. Melihat konteks yang lebih luas, Informan III menyampaikan bahwa Indonesia sebenarnya telah memiliki berbagai bentuk implementasi demokrasi digital, meskipun sifatnya masih sporadis dan belum terintegrasi secara nasional. Ia mencontohkan pengalaman pemerintahan provinsi DKI Jakarta di masa Gubernur Basuki Tjahaja Purnama yang secara terbuka menyiarkan rapat-rapatnya melalui live streaming. Praktik ini dinilai sebagai bentuk keterbukaan pemerintah yang mendekati nilai-nilai demokrasi digital.

Lebih lanjut, Informan III mencatat bahwa ruang-ruang diskusi politik di media sosial seperti YouTube, podcast, Facebook group, dan platform X (sebelumnya Twitter), menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia sebenarnya sudah aktif berdialog di ruang publik digital. Namun, aktivitas ini masih terfragmentasi dan belum difasilitasi secara struktural sebagai bagian dari sistem demokrasi digital yang mapan. Hal tersebut terungkap pada wawancara berikut:

“Tapi menurut pendapat saya, cara paling baik untuk meningkatkan literasi digital demokrasi dengan mempraktikkannya, bukan sekadar informasi aja. Digital demokrasi dipraktikkan biasanya dengan meningkatkan partisipasi publik dalam pengambilan keputusan via online forum, ruang publik digital, atau kampanye-kampanye sosial digital.” (Informan III, Enda Nasution, Social Media Advocate)

Ia juga menyoroti bahwa beberapa pemerintahan daerah telah mulai melibatkan publik dalam perumusan kebijakan, seperti RPJMD, dengan menggunakan media digital seperti Zoom. Menurutnya, metode ini dapat menjadi sarana yang efektif untuk memperluas partisipasi publik. Sayangnya, pendekatan ini belum diadopsi secara luas di tingkat nasional, termasuk dalam proses legislasi DPR, yang seharusnya bisa lebih terbuka dan inklusif melalui platform digital.

Informan III menekankan pentingnya pemerintah menyediakan ruang formal dan sistematis untuk aktivitas-aktivitas digital yang bersifat partisipatif. Ia menyarankan agar kegiatan informal seperti dialog warga dengan kepala daerah yang dulu dilakukan secara tatap muka, dapat diadaptasi menjadi sesi daring yang terbuka bagi publik. Hal ini akan memperluas akses masyarakat terhadap kebijakan dan keputusan pemerintah, sekaligus menguatkan fondasi demokrasi digital. Dalam kesimpulannya, Informan III melihat bahwa benih-benih demokrasi digital sudah tumbuh di Indonesia. Namun, hingga kini belum ada struktur atau kerangka yang benar-benar mengakui dan mengelola perkembangan ini

sebagai bagian dari sistem demokrasi yang sah dan berkelanjutan. Demokrasi digital di Indonesia masih berada pada fase awal terbentuk secara alami namun belum diberi “rumah” secara institusional.

Berdasarkan konsep yang diangkat Castells, cyberdemocracy dapat dipahami sebagai suatu bentuk demokrasi yang muncul dari jaringan digital yang memungkinkan partisipasi horizontal, desentralistik, dan berbasis dialog (Arianto et al., 2025). Namun, sebagaimana dikemukakan Informan II, kita saat ini masih berada dalam fase ambivalen. Internet memang telah membuka akses dan kanal partisipasi luas, namun kualitas partisipasi warga dalam ruang ini belum sepenuhnya mencerminkan demokrasi deliberatif yang sehat. Hal itu terungkap pada wawancara berikut:

“Kita berada di fase ambivalen. Di satu sisi, internet dan media sosial telah membuka ruang partisipasi yang luar biasa siapapun bisa menyuarakan pendapat, memobilisasi dukungan, bahkan mengawasi jalannya pemerintahan secara real-time. Tapi di sisi lain, ruang ini juga sangat rentan terhadap distorsi informasi, manipulasi opini melalui buzzer politik, dan polarisasi yang cukup ekstrem.” (Informan II, Algooth Putranto, Pengamat Media Sosial/Akademisi Ilmu Komunikasi)

Dari hasil observasi dan wawancara, akun @literasidemokrasi.id masih mengedepankan pola komunikasi satu arah (top-down), meskipun berada di medium interaktif. Konten yang disajikan masih dominan bersifat informatif normatif, belum sepenuhnya dirancang untuk mendorong dialog atau membuka ruang diskusi kritis. Meskipun konten akun ini secara topik terkait literasi demokrasi, struktur komunikasinya masih banyak bersifat informatif satu arah, yakni menyampaikan pengetahuan tanpa membangun dialog kritis. Hal ini menunjukkan bahwa strategi komunikasi yang digunakan lebih mirip dengan penyampaian informasi normatif ketimbang komunikasi politik yang partisipatif. Hal ini kontekstual bila dibandingkan dengan temuan bahwa banyak akun resmi lembaga pemerintah cenderung bersifat “aktif tapi tidak hidup” konten sering diproduksi tetapi tidak berhasil menciptakan *engagement* yang bermakna dengan audiens. Dengan demikian, upaya akun seperti @literasidemokrasi.id hanya akan bermakna jika dikaitkan dengan kerangka yang lebih besar: yaitu mendorong partisipasi digital yang aktif, terstruktur, dan diakui secara nasional.

Hal ini memperlihatkan adanya ketimpangan antara potensi platform dan strategi komunikasinya. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara potensi partisipatif media sosial dan strategi komunikasi yang dijalankan. Dalam perspektif ruang publik digital, sebagaimana dikemukakan oleh Habermas, Jürgen, kualitas demokrasi sangat bergantung pada adanya diskursus yang deliberatif dan partisipatif (Rizqian, 2025). Jika komunikasi hanya berlangsung satu arah, maka fungsi media sosial sebagai ruang dialog publik belum dimanfaatkan secara optimal.

Padahal, sebagaimana disampaikan Informan I, literasi demokrasi seharusnya tidak berhenti pada pemahaman prosedural, tetapi harus mendorong keterlibatan warga dalam proses demokrasi secara aktif dan reflektif. Dalam konteks literasi demokrasi, sebagaimana diuraikan dalam kerangka teoritis penelitian ini, literasi tidak hanya menyangkut kemampuan memahami konsep demokrasi, tetapi juga kesadaran kritis, kemampuan menilai informasi politik, serta partisipasi aktif dalam ruang publik. Ketika akun @literasidemokrasi.id tidak memberikan ruang untuk partisipasi bermakna, maka misi literasi yang diklaim belum sepenuhnya tercapai. Informan II menegaskan bahwa generasi Z sangat responsif terhadap konten yang autentik dan mengundang mereka untuk terlibat, bukan sekadar menerima informasi secara pasif. Hal ini didukung oleh Penelitian (Tio, 2025) menjelaskan juga bahwa partisipasi politik generasi muda akan lebih bermakna ketika mereka dilibatkan secara dialogis dan reflektif. Sejalan dengan itu, temuan (Mariana, 2025) menunjukkan bahwa Generasi Z cenderung responsif terhadap format komunikasi yang autentik, interaktif, dan memberi ruang partisipasi.

Lebih lanjut, jika dikaitkan dengan tipologi warganet yang dijelaskan oleh McQuail dan diadaptasi dalam penelitian ini, audiens digital terbagi menjadi beberapa kategori: lurkers (pengamat pasif), critics (pengkritik), creators (pembuat konten), dan activists (penggerak digital) (McQuail & Deuze, 2020). Akun @literasidemokrasi.id cenderung hanya menjangkau lurkers dan sebagian kecil creators yang melakukan repost atau likes. Belum ada inisiatif dari pengelola akun untuk memfasilitasi peran critics dan activists yang justru berperan besar dalam memperkaya diskursus politik digital.

Hal ini mengindikasikan bahwa strategi komunikasi pemerintah dalam akun ini masih terjebak dalam pendekatan formalistik dan simbolik. Seharusnya, sebagaimana disarankan dalam wawancara dengan Informan I, komunikasi politik digital perlu memadukan unsur edukasi, afeksi, dan partisipasi.

Edukasi dilakukan dengan menyajikan informasi yang akurat dan relevan; afeksi dengan pendekatan visual yang emosional, dekat, dan kontekstual; serta partisipasi melalui ajakan kolaboratif seperti polling, diskusi daring, atau pembuatan konten bersama.



Sumber: Tangkapan layar akun instagram Literasi Demokrasi Id (2026)
Gambar 2. Contoh pilar konten hiburan

Dalam analisis lebih jauh, akun @literasidemokrasi.id juga belum optimal dalam menerapkan prinsip transmedia storytelling, padahal ini merupakan strategi efektif dalam menjangkau audiens muda. Konten reels, meme, komik pendek, atau podcast bisa menjadi alternatif narasi yang tidak hanya menyampaikan pesan, tetapi juga menciptakan engagement yang lebih tinggi. Informan II menyebut bahwa penyampaian isu demokrasi dan konstitusi harus menyesuaikan dengan psikologi digital anak muda, yaitu cepat, visual, dan interaktif.

Problem utama cyberdemocracy di Indonesia, seperti dikatakan Informan II, bukan pada rendahnya partisipasi, tetapi pada kualitasnya. Banyak warga yang aktif dalam ruang digital, namun tidak memiliki fondasi literasi politik yang kuat. Akibatnya, ruang digital lebih cepat diramaikan oleh informasi dangkal, narasi provokatif, atau propaganda emosional yang tidak berbasis data. Dalam konteks ini, akun Instagram @literasidemokrasi.id sebenarnya memiliki peluang untuk menjadi counter-narrative, namun masih belum maksimal karena pendekatannya yang kaku dan kurang kolaboratif. Hal tersebut terungkap pada wawancara berikut:

“Kalau akun itu hanya menyebarkan infografis pasif tanpa membangun ruang diskusi atau tidak membuka ruang pertanyaan yang aktif, maka audiens muda hanya akan melihatnya sebagai ‘akun pemerintah yang kaku.’ Tapi bila narasi demokrasi disampaikan lewat konten pendek, story interaktif, bahkan kolaborasi dengan kreator konten yang sudah dipercaya publik muda, maka akun tersebut bisa menjadi alat literasi politik yang relevan.” (Informan II, Algooth Putranto, Pengamat Media Sosial/Akademisi Ilmu Komunikasi). Konsep komunikasi dua arah ini sejalan dengan teori *two-way symmetrical communication* yang dikemukakan oleh Grunig, James E., yang menekankan pentingnya dialog dan timbal balik dalam membangun hubungan yang kredibel dengan publik (Verellia & Ginting, 2025). Selain itu, penelitian menunjukkan bahwa generasi muda lebih terlibat secara politik ketika mereka merasa memiliki ruang untuk berinteraksi, bukan sekadar menjadi audiens pasif. Dengan

demikian, format konten seperti video pendek, *story* interaktif, atau kolaborasi dengan kreator yang telah memiliki kepercayaan publik muda dapat meningkatkan relevansi dan daya jangkauan pesan literasi demokrasi.

Untuk itu, perlu ada revisi strategi komunikasi akun ini dalam tiga aspek penting. Pertama, mendorong pendekatan dialogis melalui fitur-fitur interaktif seperti Q&A, diskusi terbuka, atau kolaborasi dengan komunitas. Kedua, membangun sinergi dengan aktor-aktor digital lain seperti influencer edukatif, jurnalis muda, dan aktivis digital. Ketiga, memperluas cakupan literasi demokrasi ke isu-isu yang dekat dengan kehidupan generasi muda seperti hak digital, kebebasan berpendapat, dan keamanan data pribadi.

Meskipun akun @literasidemokrasi.id telah memanfaatkan Instagram sebagai medium yang strategis untuk menjangkau generasi muda, efektivitasnya dalam mendorong literasi demokrasi yang substantif masih perlu dikritisi. Secara kuantitatif, akun ini menunjukkan tingkat *engagement* yang cukup baik pada konten tertentu, terutama yang bersifat interaktif seperti pertanyaan atau *giveaway*. Namun, secara kualitatif, pola komunikasi yang dominan masih bersifat informatif-normatif dan satu arah. Hal ini menimbulkan pertanyaan mendasar: apakah peningkatan jumlah *likes* dan komentar benar-benar mencerminkan peningkatan literasi demokrasi, atau sekadar respons terhadap mekanisme partisipasi simbolik?

Dalam perspektif komunikasi politik, literasi demokrasi idealnya tidak hanya berorientasi pada penyampaian informasi, tetapi juga pada penciptaan ruang deliberatif. Konsep ruang publik yang dikemukakan oleh Habermas, Jürgen menekankan pentingnya diskursus rasional dan partisipasi aktif warga dalam pembentukan opini publik. Jika akun ini belum secara konsisten membuka ruang dialog yang kritis misalnya melalui diskusi tematik, respons aktif terhadap komentar, atau pengelolaan perdebatan publik maka fungsi deliberatifnya belum optimal. Dengan kata lain, akun tersebut lebih berfungsi sebagai kanal distribusi informasi ketimbang arena diskursus demokratis.

Selain itu, efektivitas literasi demokrasi juga perlu diukur dari dampak kognitif dan afektif terhadap audiens. Penelitian (Wuryanta et al., 2026) menunjukkan bahwa partisipasi politik generasi muda meningkat ketika mereka dilibatkan secara dialogis dan reflektif, bukan sekadar sebagai penerima pesan. Jika strategi komunikasi akun masih top-down, maka terdapat risiko terjadinya *pseudo-participation*, yakni partisipasi yang tampak aktif secara teknis namun tidak menghasilkan keterlibatan kritis yang mendalam.

Kritik lain berkaitan dengan konsistensi narasi dan keberanian mengangkat isu demokrasi yang lebih kompleks. Literasi demokrasi tidak hanya mencakup edukasi prosedural tentang pemilu, tetapi juga isu-isu substantif seperti kebebasan berekspresi, hak digital, polarisasi politik, dan etika komunikasi publik. Jika konten terlalu berhati-hati atau normatif, maka akun berpotensi kehilangan relevansi di mata generasi Z yang cenderung responsif terhadap konten autentik, terbuka, dan kontekstual. Keberadaan kanal digital negara tidak cukup hanya informatif, tetapi juga harus menjadi ruang emansipatoris yang memungkinkan Gen Z menjadi subjek aktif dalam praktik demokrasi, baik sebagai pembelajar, pengkritik, maupun penggerak literasi demokrasi di Indonesia, sebagai elemen kunci dalam menciptakan masyarakat yang aktif, terinformasi, dan bertanggung jawab dalam kehidupan demokrasi. Proses ini melibatkan peningkatan kemampuan individu untuk mengakses, memahami, dan menggunakan informasi digital dengan bijak, guna mendukung partisipasi aktif dalam demokrasi. Secara keseluruhan, literasi demokrasi digital di Indonesia memiliki potensi besar untuk memperkuat sistem demokrasi, memberikan warga negara kemampuan untuk membuat keputusan politik yang lebih terinformasi, serta menciptakan lingkungan politik yang lebih transparan, akuntabel, dan bebas dari manipulasi. Namun, untuk mencapai hasil yang optimal, penting untuk terus memperluas pendidikan digital ke seluruh lapisan masyarakat dan mengatasi kesenjangan digital yang ada.

Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih mendalam, sistematis, dan berkelanjutan dalam pendidikan, kolaborasi lintas sektor, dan pemberdayaan masyarakat untuk benar-benar membekali setiap individu dengan keterampilan dan pemahaman yang memadai untuk berpartisipasi secara cerdas dan aman di era digital serta berkontribusi pada penguatan praktik demokrasi. Untuk mencapai tingkat literasi yang optimal dan mengatasi tantangan yang ada, strategi peningkatan literasi demokrasi dan digital harus dijalankan dengan pendekatan yang inklusif dan strategis. Pendekatan inklusif memastikan

bahwa program-program literasi menjangkau seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok rentan, masyarakat di daerah terpencil, dan mereka yang memiliki keterbatasan akses atau kemampuan, dengan menyediakan materi dan metode yang relevan serta mudah diakses.

4. KESIMPULAN

Penelitian ini menemukan bahwa konstruksi komunikasi politik pemerintah dalam akun @literasidemokrasi.id dibentuk melalui pola framing edukatif, strategi visual yang disesuaikan dengan karakter Generasi Z, serta penyampaian pesan yang dominan informatif dan terkurasi. Representasi pemerintah sebagai fasilitator literasi demokrasi tampak konsisten dalam narasi dan desain konten. Namun, meskipun mengusung semangat *cyberdemocracy*, praktik komunikasi yang ditampilkan belum sepenuhnya mencerminkan karakter deliberatif ruang publik digital, karena partisipasi audiens lebih bersifat simbolik dibanding dialogis.

Secara teoretis, temuan ini menunjukkan bahwa implementasi *cyberdemocracy* dalam konteks komunikasi politik pemerintah di Indonesia masih berada pada tahap informasional, yakni memanfaatkan media sosial sebagai saluran distribusi pesan edukatif, bukan sebagai ruang musyawarah reflektif. Kontribusi utama penelitian ini terletak pada penegasan bahwa media sosial pemerintah dapat berfungsi sebagai instrumen literasi demokrasi dalam kerangka pemasaran politik digital, tetapi kualitas demokrasi digital yang dihasilkan sangat bergantung pada kedalaman interaksi dan pola komunikasi yang dibangun. Dengan demikian, studi ini memperkaya kajian komunikasi politik digital pemerintah dalam konteks praktik *cyberdemocracy* di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Akmal, et al. (2024). KENDALA DAN UPAYA KPU DALAM MENINGKATKAN LITERASI POLITIK GENERASI Z PADA PEMILU 2024 MELALUI INSTAGRAM. *JOURNAL OF EDUCATION*.
- Alam, S. (2021). *Penggunaan Media Sosial Sebagai Alat Komunikasi Politik*. 09(01), 68–78.
- Ardiansyah, F., & Muhaimin. (2024). *Analisis Komunikasi Politik dalam Kampanye Pemilu: Pendekatan Kualitatif terhadap Strategi dan Dampaknya di Media Sosial*. 3, 1145–1150. <https://doi.org/10.56672/assyirkah.v3i3.240>
- Arianto, B., Ludiro, M., & Oktiva Anggriani. (2025). *Demokrasi Digital*. CV. Jawara Kreasinografi.
- Arifuddin, H. (2025). Tantangan Post-truth dalam Ruang Publik Indonesia Pasca Pemilihan Umum 2024 Political Literacy Education and Post-truth Challenges in the Indonesian Public Space After the 2024 General Election. *Action Research Journal Indonesia (ARJI)*, 76.
- Astika dan Ira. (2023). *Strategi Pemasaran Politik di Era Digital*. CV Cendekia Press.
- Buru, C., Japa, H. B., & Patriano Vano, M. (2025). *Kaum Muda sebagai Agen Demokrasi Digital : Analisis Peran Teknologi dalam Partisipasi Politik Generasi Digital*. 35(34). <https://doi.org/10.35312/serifilsafat.v35i34.274>
- Farikiansyah, I. M., Salamah, M. N., Rokhimah, A., Ma, L., Islam, P. A., Islam, U., & Sunan, N. (2024). Meningkatkan Partisipasi Pemilu melalui Literasi Politik Pemuda Milenial dalam Pendidikan Kewarganegaraan. *Journal of Education Research*, 5(4), 6512–6523.
- Hasfi, N. (2019). KOMUNIKASI POLITIK DI ERA DIGITAL. *Politika Jurnal Ilmu Politik*, 10(1), 93–111.
- Hastrida, A. (2023). THE INFLUENCE OF DIALOGIC COMMUNICATION ON TRUST IN GOVERNMENT. *JURNAL STUDI KOMUNIKASI DAN MEDIA*, 19(2022), 141–160. <https://doi.org/10.17933/jskm.2023.5144>
- Ilhami, M. J., Ananda, D., Alya, R., & Hafizi, M. Z. (2025). Pemanfaatan Media Sosial sebagai Sarana Edukasi Politik bagi Mahasiswa FKIP Universitas Tanjungpura. *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 4(10), 2795–2800.
- Mariana, A. (2025). EFEKTIVITAS PEMASARAN DIGITAL PADA GENERASI Z. *JURNAL ILMIAH KAJIAN KOMUNIKASI Volume*, 4(1), 63–85.
- McQuil, D., & Deuze, M. (2020). *MCQUAIL'S Media & Mass Communication Theory*. 2020.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook*. Sage.

- Mujianto, H., & Nurhadi, Z. F. (2022). Dampak Literasi Media Berbasis Digital Terhadap Perilaku Anti Penyebaran Hoaks. *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah*, 21(1), 31–47.
<https://doi.org/10.18592/alhadharah.v21i1.6419>
- Rahmah, S., Mainuru, S., & Fatimah, J. M. (2025). Mobilisasi Generasi Z di Kota Kendari pada Pilkada 2024 : Kajian Literatur Sistematis Strategi Komunikasi Politik. *Pendas : Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 10, 300–317.
- Rizqian, D. R. (2025). Ruang Publik Deliberatif Digital: Analisis Platform Symbolic ID dalam Perspektif Demokrasi Deliberatif Jürgen Habermas. *Jurnal Sosial Politik Dan Hukum*, 2, 20–29.
- Tio, T. (2025). Rasionalitas Politik Kaum Muda Di Era Bonus Demografi: Analisis Pemikiran Hannah Arent. *JURNAL AKADEMIKA*, 25(1).
- Tucker, J. A., & Guess, A. (2018). *Social Media, Political Polarization, and Political Disinformation : A Review of the Scientific Literature*. March, 1–95.
- Verellia, M. S., & Ginting, E. (2025). *DENGAN MASYARAKAT (STUDI PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA BIDANG INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK DI KABUPATEN OGAN KOMERING ULU)* Melanie Shava Verellia Eraskaita Ginting Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. 4(Februari), 74–81.
- Wuryanta, A. G. E. W., Utoyo, A. W., & Theresia Lavietha Vivrie Lolita. (2026). Teknologi Digital Cerdas Dan Komunikasi Politik Pemerintah : Peluang Tata Kelola Adaptif dan Risiko Distorsi Demokrasi. *SENAKOM: Prosiding Seminar Nasional Komunikasi*, 3(1).

Halaman ini dikosongkan